Palita: Journal of Social Religion Research
April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752
http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v8i1.3587

Representasi Identitas Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai Media Resolusi Konflik Etnoreligius di Mamasa

[1] Mahyuddin, [2] Muhammad Zaldy Febry
[1,2] Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat : Jalan Amal Bakti No. 8
Email: mahyuddin032@gmail.com

Abstract

Social conflict in Mamasa was a crucial issue. The conflict which initially had a political dimension has led to ethnic and religious conflicts. Various efforts to rebuild the social integration of the community continue to be carried out. This study aims to examine the role of religious identity representation as media of conflict resolution in building social reintegration. The author analyzes the electoral arena in Mamasa which always provides space for religious representation in contesting. The research used an ethnographic approach to explain this phenomenon. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. This study found that religious representation in the regional head election has a significant role in the process of social reintegration of the community in Mamasa district, West Sulawesi. In the process, the community does not rely on extreme identity politics (ethnic and religious) but rather builds moderate political awareness. These political choices contribute to the development of social integration in society.

Keywords: *Conflict Reconciliation, Religious Identity, Ethnoreligious.*

Abstrak

Konflik sosial di Mamasa merupakan isu yang krusial. Konflik yang awalnya berdimensi politis telah mengarah pada konflik etnis dan agama. Berbagai upaya membangun kembali integrasi sosial masyarakat pun terus dilakukan. Studi ini bertujuan untuk menelaah peran keterwakilan identitas agama sebagai media resolusi konflik dalam upaya membangun reintegrasi sosial. Penulis menganalisis percaturan pilkada di Mamasa yang senantiasa memberi ruang bagi keterwakilan agama dalam berkontestasi. Penelitian menggunakan pendekatan etnografi dalam menjelaskan fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa representasi keterwakilan agama dalam pesta demokrasi pilkada memiliki peran signifikan dalam proses reintegrasi sosial masyarakat di kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dalam prosesnya, masyarakat tidak menandaskan diri pada politik identitas ekstrem (etnis dan agama) melainkan membangun kesadaran politik yang moderat. Pilihan politik ini berkontribusi pada pengembangan integrasi sosial di masyarakat.

Kata Kunci*: Resolusi Konflik, Identitas Agama, Etnoreligius.*

Pendahuluan

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu daerah yang pernah dilanda konflik sosial keagamaan. Problem sosial tersebut dipicu oleh konflik politik pemekaran daerah yang kemudian tumbuh menjadi konflik horizontal bernuansa SARA[1]. Setidaknya segregasi sosial dan ketegangan hubungan antarkelompok sosial sempat menggeliat dan mengancam keharmonisan sosial di masyarakat [2].

Sejak berakhirnya konflik bernuansa etnis dan agama di Mamasa, perkembangan kehidupan sosial dan politik antarumat dan anggota masyarakat mulai membaik. Kondisi sosial politik setelah konflik berakhir, menunjukkan bahwa isu etnis dan agama dalam kehidupan masyarakat tidak lagi menonjol. Setidaknya segregasi sosial dan ketegangan hubungan antarkelompok agama yang mengancam keharmonisan sosial tidak lagi mengemuka yang ditandai dengan kerukunan sosial masyarakat masih terjaga dengan sangat baik[3].

Salah satu isu yang menarik di ranah ini adalah konflik bernuansa etno-religius diurai melalui model kebijakan dan pendekatan keterwakilan identitas agama dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dari awal mula terbentuknya Mamasa hingga sekarang, masing-masing pemimpin di daerah tersebut senantiasa menggandeng identitas agama, baik Islam maupun Kristen di setiap pasangan calon kepala daerah. Walhasil, mobilisasi politik atas nama agama dan etnik, tidak lagi mengarah pada parameter-parameter primordialisme yang memfasilitasi mencuatnya konflik di daerah tersebut. Itikad baik masyarakat dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sehat telah mengantarkan masyarakat menuju damai dengan kearifan baru [4].

Proses sosial ini tentu saja menjadi modal penting dalam merawat keberagaman di tengah berbagai konflik berbasis identitas di setiap perhelatan pilkada. Apalagi dewasa ini, masyarakat Indonesia masih sering dirundung permasalahan ketegangan etnis dan agama yang cenderung tinggi pada wilayah-wilayah yang pernah dimuati konflik sosial dalam perhelatan pilkada. Ini diperkuat pula dengan hasil survei Wahid Foundation di awal

---

[1] Zulkifli Abdullah, "Kontestasi Elit Lokal Dalam Konflik Politik Pemekaran Daerah (Studi Kasus Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa Di Sulawesi Barat)" (Universitas Indonesia, 2016), http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20433398&lokasi=lokal.

[2] Tabah Maryanah, "Governance Dalam Manajemen Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 4, no. 1 (2013): 7–16.

[3] Muhammad Sadli Mustafa, "Potret Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Mamasa," *Al Qalam* 20, no. 72 (2014): 129–38.

[4] Hamdar Arraiyah, "Menuju Damai Dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik Di Aralle, Tabulahan Dan Mambi)," *Al-Qalam* 11, no. 2 (2018): 26–42.

tahun 2020 bahwa radikalisme dan intoleransi cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan tren tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor kontestasi politik [5].

Di berbagai belahan nusantara, kini semakin dapat disaksikan bahwa polarisasi perbedaan etnis dan agama dalam politik terutama saat pilkada mengalami gelombang pasang di mana ada upaya perebutan kekuasaan politik yang menitikberatkan pada identitas etnik dan agama [6,7]. Dalam kondisi ini, Indonesia yang memiliki ragam kelompok entitas etnis, tradisi budaya serta agama, dihadapkan pada persoalan krusial bagaimana mengelola keberagaman dalam berdemokrasi. Betapa tidak, masyarakat dengan beragam identitas tersebut, semakin mudah ditemukan dengan jelas pembelahan politik di tingkat lokal dan nasional berkaitan dengan soal relasi antarumat beragama sebelum dan setelah pemilihan kepala daerah berlangsung [8, 9].

Adanya keterwakilan identitas agama dalam pilkada Mamasa, menunjukkan demokrasi di tingkat lokal daerah tersebut tumbuh berkembang mengakomodir semangat integrasi sosial. Sistem politik lokal yang memberi ruang bagi keterwakilan identitas agama dalam demokrasi telah memperkuat basis keharmonian sosial dalam kerangka penguatan politik keseimbangan sebagai pengejawantahan dari upaya meminimalkan segregasi sosial masyarakat Mamasa pasca konflik. Ini terjadi karena masyarakat tidak hanya menaruh penghormatan terhadap perbedaan, melainkan kesediaan di antara warga untuk saling mendukung dan menciptakan kehidupan yang damai.

Fenomena sosial politik di atas bukan merupakan hal baru bagi daerah yang pernah dilanda konflik etnisitas dan agama. Jika bergeser selangkah ke bagian Timur Indonesia khususnya Provinsi Maluku, yang menarik adalah pesta demokrasi di tingkat lokal juga menerapkan keterwakilan agama sebagai sarana perdamaian. Ambon yang memiliki sejarah kelam perihal

---

[5] Wahid Fondation, "Survei Wahid Institute: Intoleransi-Radikalisme Cenderung Naik" (Jakarta, 2020), https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/284269/survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik.

[6] Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

[7] Sabara Nuruddin, "Basis Paradigmatik Atas Paradoks Agama, Beragama & Keberagaman" (Makassar, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 2019).

[8] Ian & Prayogi Irfan Pasaribu, "Bekerjanya Politisasi Identitas Pada Pilkada Sumut 2018: Menakar Pengaruh Isu Agama Terhadap Kemenangan Efy Rahmayadi Dan Musa Rajekshah," *Adhyatsa Pemilu* 4, no. No. 1 2018 (2018): Hal. 11-28.

[9] Mahyuddin, "The Crisis of Intolerance and Primordialism in the Name Of Religion in Indonesia: A Case Study Of Pilkada DKI Jakarta at 2017," *Kuriositas* 12, no. 2019 (2019): 29–30.

konflik berbasis agama dan sengkarut aneka konflik lainnya ternyata mampu menghadirkan ruang kontestasi dalam rajutan representasi agama dalam pesta demokrasi sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan perjanjian Malino[10].

Dalam buku yang tulis oleh Tim Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan bekerja sama dengan The Habibie Center tahun 2014 yang berjudul Segregasi, Kekerasan dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik Ambon, dituliskan bahwa segregasi pasca konflik di Maluku diwadahi oleh berbagai unsur di masyarakat untuk mencapai perdamaian, salah satunya adalah aspek politik yang menerapkan politik representasi [11]. Pembagian kekuasaan dalam jawatan politik antara Islam dan Kristen atau sebaliknya, mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan masyarakat sehingga di ranah sosial politik tercipta suasana yang kondusif.

Sebagaimana di Mamasa, dalam prosesnya ada *power sharing* simbol agama di setiap perhelatan pilkada. Jika calon kepala daerahnya beragama Islam, maka wakilnya beragama Kristen. Sebaliknya, jika calon kepala daerahnya Kristen, wakilnya Islam. Potret ini yang mewarnai prosesi pesta demokrasi di aras lokal Mamasa. Pengambilan keputusan pencalonan kepala daerah yang akan berkontestasi, menyokong keanekaragaman (pluralitas) yang secara tidak langsung turut mendorong terjadinya reintegrasi masyarakat. Dengan kata lain, manifestasi partikular identitas agama dan etnis di ranah politik (eksekutif) yang menawarkan relativisasi identitas masyarakat dan kelompok agama sekaligus etnis, secara berkesinambungan telah melahirkan iklim demokrasi yang mengedepankan pilar-pilar kebersamaan dalam perbedaan.

Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu ialah basis representasi agama dalam Pilkada Mamasa dilegitimasi secara ketat oleh lembaga adat dan agama. Menariknya, persepakatan tersebut lahir dari kontrak sosial tidak tertulis[12]. Hal ini yang menjadikan cara pandang masyarakat Mamasa kian terbuka untuk mengakomodir perbedaan identitas. Terbukti, perpaduan kandidat calon kepala daerah yang menyandingkan

---

[10] Saidin Ernas, "Policy of Social Conflict Resolution: Implementation of the Malino Agreement in Maluku," *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 2 (2012).

[11] Mohammad Hasan Ansori et al., *Segregasi, Kekerasan Dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik Di Ambon* (Jakarta: The Habibie Center, 2014).

[12] Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat disebutkan bahwa sejak dahulu para tokoh masyarakat di Mamasa telah membentuk formula keterwakilan agama sebagai media resolusi konflik. Masyarakat lokal menyebut sebagai perjanjian tidak tertulis di mana strategi ini telah mengakar di masyarakat dan cukup efektif mencegah segregasi sosial di Mamasa terutama dalam Pilkada.

pasangan beda agama, selalu menjadi pilihan utama warga dalam pilkada sehingga mereka secara perlahan terhindar dari konflik bernuansa identitas.

Melalui pilkada masyarakat Mamasa menegosiasikan pengelolaan konflik etno-religius dengan memberi tempat (representasi) identitas agama dalam politik yang kondisi demografi suku, adat, agama, historitasnya berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Masyarakat Mamasa yang terbelah dan tersegregasi berdasarkan identitas agama dan etnis serta kesejarahan pasca konflik, kini menuju proses integrasi sosial yang positif. Peniadaan partikularisme identitas dalam kontestasi demokrasi telah menjadi penghubung untuk merajut kembali keharmonian sosial.

Dengan demikian, tulisan ini mengulas fenomena keterwakilan identitas agama dalam pilkada Mamasa dari masa ke masa. Pertanyaan yang diajukan ialah bagaimana proses terjadinya konflik bernuansa etnis dan agama di Mamasa yang melahirkan disintegrasi sosial masyarakat, dan bagaimana peranan keterwakilan agama sebagai jalan mengurai konflik sosial?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis etnografi. Pendekatan ini digunakan sebab peneliti mengeksplorasi corak budaya masyarakat Mamasa yang beragam secara kultural dan agama dan mendeskripsikan dinamika pergulatan identitas agama dan politik di baliknya. Melalui studi lapangan, peneliti menggunakan metode pengamatan dengan memilih *setting* aspek pengalaman aktor-aktor upaya merawat toleransi dalam berdemokrasi, dimana peneliti memperoleh pemahaman tentang konflik etno-religius di daerah tersebut dan strategi-strategi masyarakat dalam mengelolanya menuju perdamaian yang diimplementasikan dalam prosesi demokrasi di tingkat lokal.

Lokasi penelitian mengambil tempat di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat tepatnya di kota Mamasa dan tiga wilayah kecamatan yakni kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi. Ketiga kecamatan ini dipilih menjadi lokasi penelitian sebab daerah tersebut merupakan titik pusat konflik di masa silam yang kemudian melahirkan istilah konflik ATM (Aralle, Tabulahan, Mambi). Penelitian kualitatif ini lebih ditekankan pada proses eksplorasi mengelola konflik etnis dan agama dengan pendekatan perwakilan identitas agama dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini lebih banyak mengambil data berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, pemerintah, tokoh pemuda dan tokoh pendidik. Analisis terhadap data-data temuan tersebut kemudian dijelaskan menggunakan pendekatan teori sosial dalam menelaah interelasi masyarakat

dalam membangun kerukunan dan reintegrasi sosial dalam praktik demokrasi lokal di Mamasa. Pengolahan data yang diperoleh dari lapangan dikorelasikan dengan konsep otoritas dalam sudut pandang sosiologi agama dalam praktek pengelolaan kerukunan di Kabupaten Mamasa. Proses analisis data yang sudah diolah adalah dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Haberman [13]. Data lapangan yang telah diperoleh, direduksi, disajikan kemudian menarik dan menguji kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Konflik Mamasa: Isu Pemekaran Berbalut Identitas Etnis dan Agama

Secara etimologi, konflik berasal dari kata *conflict* yang berarti percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Menurut kamus Webster, istilah konflik di dalam bahasa aslinya berarti suatu "perkelahian, peperangan, atau perjuangan", yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak [14] . Namun, makna kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain [15].

Konflik merupakan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Fenomena konflik sosial ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan[16]. Dengan kata lain, konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang berbeda [17]. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

Konflik yang terjadi di Mamasa bermula sejak adanya wacana pemekaran daerah. Mamasa yang awalnya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Polewali Mamasa Sulawesi Selatan, diresmikan menjadi kabupaten setelah terbentuk provinsi baru bernama Sulawesi Barat. Benih-benih konflik menyeruak tatkala terjadi pro kontra pemekaran di antara kelompok-kelompok masyarakat. Singkatnya, konflik sosial yang terjadi di

---

[13] Aan Satori, Djama`an & Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

[14] Robert Alfred Amsler, *The Structure of The Merriam-Webster Pocket Dictionary* (Texas: The University of Texas at Austin, 1980).

[15] Dean G. & Jeffrey Z. Rubin Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, Terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

[16] Novri Susan, *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

[17] Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

Mamasa beberapa tahun silam merupakan imbasan dari pemekaran daerah [18]. Kontestasi elit dan tokoh masyarakat telah menumbuhkan benih-benih konflik sosial politik di lingkup kehidupan sosial masyarakat yang kemudian mempengaruhi kohesi sosial masyarakat[19].

Sejak Mamasa dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri di tahun 2003, beberapa wilayah di Mamasa secara khusus Aralle, Tabulan, Mambi (ATM) telah meletus konflik karena perseteruan antara kelompok pro pemekaran dan kontra pemekaran. Namun dalam proses ini, diketahui faktor sejarah dan agama juga menjadi pemicu utama terciptanya konflik yang berkepanjangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arraiyah, menemukan bahwa sebagian besar masyarakat Mandar yang tergabung dalam ikatan sejarah *Pitu Ulunna Salu* dan *Pitu Ba'bana Binanga* merasa berkeberatan dengan dipilihnya Mamasa sebagai ibu kota kabupaten dan nama kabupaten. Ini karena secara histori dan agama, masyarakat Mandar yang tergabung dalam ikatan komunal tujuh kerajaan yang secara kebetulan mayoritas beragama Islam, merasa lebih terhormat kedudukannya dibanding Mamasa yang kebetulan mayoritas beragama Kristen[20].

Terbentuknya kabupaten Mamasa telah menimbulkan konflik etnisitas di wilayah ATM yang memang pada awal pembentukan kabupaten tersebut tetap menolak bergabung dengan kabupaten Mamasa. Konflik tersebut menjadi runyam tatkala para elit mulai memobilisasi massa yang mengangkat kembali semangat primordialisme yakni, beberapa pihak mencoba memprovokasi dengan gesekan perbedaan identitas yang nyata, yaitu perbedaan kultur dan budaya[21]. Alhasil, politisasi agama dan perbedaan etnis merupakan unsur yang cukup dominan di Mamasa yang terejawantahkan dalam konflik dan kekerasan terbuka.

Konflik di Mamasa dalam prosesnya telah melahirkan implikasi yang serius bagi keberlangsungan kehidupan sosial yang damai. Setidaknya, konflik di Mamasa telah menyebabkan retaknya hubungan-hubungan sosial yang intim di antara kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terbangun dengan baik. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi gesekan sosial

---

[18] Maryanah, "Governance Dalam Manajemen Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 4, no. 1 (2013): 7–16.

[19] Zulkifli Abdullah, "Kontestasi Elit Lokal Dalam Konflik Politik Pemekaran Daerah (Studi Kasus Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa Di Sulawesi Barat)" (Universitas Indonesia, 2016), http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20433398&lokasi=lokal.

[20] Arraiyah, "Menuju Damai Dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik Di Aralle, Tabulahan Dan Mambi)." *Al-Qalam* 11, No. 2 (2018): 26–42.

[21] Andi Hasnul Hasanuddin, "Konflik Etnisitas Dalam Pemekaran Wilayah:: Studi Tentang Konflik Etnisitas Dalam Pembentukan Kabupaten Mamasa" (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005).

identitas etnis, tetapi juga mengarah pada agama. Akibatnya, iklim persaudaraan antarsesama warga pegunungan yang terbangun sejak bertahun-tahun lamanya mulai terusik yang dampaknya masih dirasakan sampai saat ini terutama potensi ancaman konflik horizontal.

Konflik sosial yang tumbuh menjadi isu etnoreligius ini, membawa implikasi sosial yang serius dalam kehidupan masyarakat. Sampai saat ini sekelompok anggota masyarakat yang tidak ingin kembali ke wilayah dataran tinggi Mamasa lantaran trauma dengan tragedi konflik kekerasan yang sering mengatasnamakan agama dan bernuansa etnis. Meski demikian, seiring dengan berjalannya waktu, diantara anggota masyarakat memutuskan untuk kembali bermukin di Mamasa lantaran mereka telah mengimplementasikan manajemen konflik sebagai bentuk respons mereka terhadap kondisi masyarakat yang dihantui dengan konflik dan ketegangan sosial yang mengarah pada isu etnoreligius.

Representasi Identitas Agama sebagai Media Resolusi Konflik

Dalam sistem demokrasi, keterwakilan merupakan poin penting bagi jalannya pemilihan umum. Setiap anggota masyarakat sebagai warga negara memilih orang-orang yang dapat mewakili mereka tidak hanya di parlemen, tetapi juga di ranah eksekutif (pemerintahan). Dengan kata lain, pemilu sangat erat kaitannya dengan mandat yang diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang untuk menduduki jabatan pemerintahan. Di sini, pemilu berfungsi memberikan legitimasi terhadap pemerintahan dan legitimasi itu sendiri berarti anggota masyarakat (*the polity*) menerima bahwa mereka yang memiliki kekuasaan tersebut sah berada di posisinya melalui pemilu kemudian mereka yang terpilih akan menjalankan kewenangannya[22].

Relasi yang terbangun antara kelompok etnis dan agama di Mamasa sejak pecahnya konflik mengalami pasang surut. Hal tersebut terlihat pada proses resolusi konflik yang membutuhkan waktu panjang pihak-pihak yang tengah berkonflik membangun kesadaran bersama (kesadaran kolektif) melalui saluran representasi identitas agama dalam pilkada untuk menduduki jabatan kepala daerah (bupati). Dalam kondisi tersebut, keterlibatan tokoh masyarakat (adat dan agama) yang mengarahkan pengembangan demokrasi substantif telah membawa masyarakat merajut kebersamaan.

Di kehidupan sosial, terdapat keharusan atau aturan-aturan adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat, meliputi segala perbuatan yang dilarang,

[22] Chusnul Mar'iyah, "Pemilu Dan Demokrasi: Belajar Dari Lokal," in *Seri Pemilu Dan Partai Politik Belajar Dari Politik Lokal* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2013).

diperbolehkan atau diperintahkan. Hal yang menjadi penekanan tokoh adat dan agama di Mamasa agar para warga senantiasa menaati aturan adat terutama menjaga harkat dan martabat kemanusiaan tanpa membeda-bedakan identitas. Yang terpenting dalam berdemokrasi ialah bagaimana para anggota masyarakat agar selalu menjaga persatuan dan persaudaraan, bahwa masyarakat Mamasa memiliki identitas kolektif sebagai sesama warga pegunungan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

Pilkada Mamasa telah menunjukkan bahwa perwakilan agama dalam penyelenggaraan pemilu menjadi satu entitas kearifan dalam berdemokrasi. Tetapi, argumentasi lain yang bisa dikemukakan di sini adalah proses ini merupakan langkah meminimalkan fragmentasi masyarakat dilihat dari segi agama di mana diperlukan kerangka demokrasi yang mampu mengakomodir perbedaan agama untuk memutus atau meminimalisasi persoalan ini. Ini sejalan dengan padangan Jeff Heynes bahwa demokrasi substantif yang diperlukan sesungguhnya adalah mendorong kepedulian terhadap pengembangan moralitas *parennial*, kesetaraan, keadilan, serta kebebasan sipil [23]. Hal ini menjadi niscaya pula untuk diterapkan dan menjadi agenda pengembangan demokrasi di Mamasa saat ini dan masa depan.

Mamasa yang pernah dilanda konflik bernuansa identitas (Islam vs Kristen), tengah mencoba merajut sebuah strategi dalam Pilkada untuk mewakilkan identitas agama sebagai sarana membangun rekonsiliasi sosial. Basis demokrasi ini merupakan sebuah cara mengelola konflik yang disokong oleh lembaga agama dan adat setempat. Mereka tidak membuat pemisahan yang ketat antaragama dalam wilayah publik politik untuk membangun pengembangan bersama pasca konflik. Dengan kata lain, pemerintah Mamasa bersama warga masyarakat mendorong mitigasi konflik dengan berpandangan netral dan moderat dalam mendudukkan para pemangku jabatan publik secara khusus di bidang eksekutif (pemerintahan).

Mengelola keragaman berbasis demokrasi lokal tersebut merupakan langkah preventif mencegah konflik berkepanjangan menuju reintegrasi sosial. Segmentasi agama dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengurai konflik politik yang sebelumnya menggema di daerah ini. Upaya mengusung keterwakilan identitas agama (Islam-Kristen) di setiap perhelatan Pilkada dijadikan format politik baru demi meminimalkan tensi politik identitas yang bisa menggerus semangat kebersamaan masyarakat. Politik representasi kemudian termanifestasikan dalam bentuk pasangan calon (Islam-Kristen

[23] Jeff Heynes, *Demokrasi Dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga*, Terjemahan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).

atau Kristen-Islam) untuk menduduki jabatan kepala daerah hingga dua puluh tahun terakhir telah melembaga yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan.

Tabel 1. Pasangan Kepala Daerah dengan Kombinasi Beda Agama

Bupati	Wakil Bupati	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Kombinasi Agama
M. Said Saggaf	Victor Paotonan	2003	2008	Islam dan Kristen
Obed Nego Depparinding	Ramlan Badawi	2008	2011	Kristen dan Islam
Ramlan Badawi	-	2011	2013	-
Ramlan Badawi	Victor Paotonan	2013	2018	Islam dan Kristen
Ramlan Badawi	Bonggalangi	2016	2018	Islam dan Kristen
Ramlan Badwai	Marthinus Tiranda	2018	Petahana	Islam dan Kristen

Sumber : diolah dari berbagai sumber media nasional dan lokal, di Tahun 2011 sampai 2013 ada kekosongan jabatan wakil bupati[24].

Berdasarkan informasi yang digali oleh penulis dari beberapa sumber media dan informan, masyarakat Mamasa sesungguhnya sejak dahulu kala memang sudah memiliki semangat kolektif yang baik. Di antara kelompok-kelompok masyarakat di masa silam telah menetapkan berbagai kerangka sosial untuk tetap bersatu yang terejawantahkan dalam persekutuan Hadat di atas pegunungan Kabupaten Polewali Mamasa, di mana dari tujuh Hadat tersebut enam di antaranya sekarang sudah terbentuk menjadi Kabupaten Mamasa [25]. Namun keselarasan sosial itu mulai pudar tatkala berhadap-hadapan dengan kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Karena itu, salah satu strategi untuk menguatkan kebersamaan masyarakat pasca konflik, ialah pelaksanaan demokrasi dijalankan dengan mewakilkan dua entitas kelompok agama sebagai tindak lanjut persepakatan tokoh-tokoh masyarakat sebelumnya.

Strategi ini selain berfungsi memberikan hak-hak politik setiap warga untuk dipilih, juga sebagai upaya menjunjung tinggi semangat kebersaman

[24] Kekosongan ini terjadi karena ada transisi pergantian kepala daerah setelah Bupati Obed Nego Depparinding terjerat hukum.

[25] Hendry Jonathan Manase, *Mappurondo: Budaya Khas Dan Kearifan Lokal Sulawesi Barat*, ed. Sarman Sahuding (Mamuju: Bumi Transindo, 2019).

terutama menjaga kerukunan Umat beragama di pegunungan Kabupaten Mamasa. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi konflik identitas, maka warga menyepakati untuk mengusung perwakilan setiap agama dalam tampuk kepemimpinan kabupaten Mamasa demi mengurangi tensi atau ketegangan di antara masyarakat yang berbeda agama. Dalam proses ini, meski tidak dinafikan jika masih ada sikap primordialisme di ranah publik, tetapi di lingkup dan proses pilkada tidak begitu mengemuka. Terbukti, di setiap perhelatan Pilkada Mamasa, masyarakat lebih memilih pasangan calon yang mengusung dua identitas agama. Dalam politik, para warga tidak melihat perbedaan suku, adat, ras dan agama melainkan menandaskan diri bagaimana membangun politik lokal yang dapat menciptakan demokrasi sehat sehingga mereka terhindar dari konflik sosial[26].

Pengelolaan dan institusionalisasi sistem demokrasi semacam ini, menjadikan transisi konflik lebih mudah dikendalikan [27]. Bahwa para kandidat kepala daerah di Mamasa mampu menjaga stabilitas dan dinamika politik demi saling mendukung dan saling menghormati dalam proses politik yang terus menerus berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Di sinilah pilkada Mamasa mengapresiasi realitas keragaman dan resolusi sosial dalam berdemokrasi. Semua itu dapat dilihat dan tercermin dalam setiap perhelatan pilkada yang memberi ruang kepada perwakilan agama untuk berpasangan dalam pilkada dari masa ke masa.

Kondisi-kondisi komunikasi yang dibangun antarwarga, memengaruhi hadirnya persepakatan keterwakilan identitas. Inilah proses demokrasi *deliberatif*, yang disebut Habermas sebagai opini-opini yang berkembang secara informal diinstitusionalisasi dalam kehidupan politik sepanjang alasan-alasan tersebut diterima secara intersubjektif oleh semua warga masyarakat. Kehendak demokratis bersama yang kemudian disokong oleh kehadiran agama atau berkenaan dengan simbol identitas agama di ruang publik[28], memiliki peranan penting dalam membentuk lahirnya kontrak sosial untuk mewakilkan identitas sebagai upaya mengantisipasi konflik berkepanjangan di lingkup kehidupan sosial.

Cita perdamaian dan resolusi konflik sosial ini memberikan jalan damai di setiap proses pilkada Mamasa dengan menghadirkan dua identitas agama yang dapat mengatasi kecenderungan menguatnya politik identitas

---

[26] Hasil wawancara dengan tokoh pemuda WN. Ia bercerita jika di Mamasa masyarakat tidak pernah mempermasalahkan perbedaan agama dalam politik. Terbukti, bahwa warga selalu memenangkan pasangan Bupati yang mengusung dua identitas agama.

[27] Martina Klicperova-Baker and Ivo K Feierabend, "Democracy—Institutionalized Conflict Resolution: Social Psychological Explanation of Its Decline.," *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology* 26, no. 2 (2020): 227.

[28] Gusti A.B Menoh, *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2015).

berbasis etnis dan agama di level akar rumput. Oleh karena itu, titik tumpu tujuan ini adalah semangat kebersamaan dan kekeluargaan dengan menghargai kebebasan pilihan individu dan penekanan bahwa setiap individu atau anggota masyarakat perlu mengedepankan toleransi dan solidaritas sosial untuk menghindari konflik etnis dan agama di kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.

Kolaborasi Dua Agama dan Pelembagaan Politik Saling Mengerti

Politik saling mengerti merupakan suatu konsepsi yang diperkenalkan oleh Piet H. Khaidir. Konsepsi politik saling mengerti diterjemahkan sebagai sebuah rajutan dialogis antara kepentingan-kepentingan politik untuk mencari kesepahaman. Kesepahaman yang dimaksud ialah bagaimana setiap individu dan kelompok mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan kelompok lain agar bisa diperoleh tujuan politik yang sama [29].

Praktik politik yang lebih beradab adalah tujuan utama dari pola paradigma politik ini, bahwa setiap anggota masyarakat berupaya menumbuhkan dialog dan kesadaran tentang pentingnya kesatupaduan di ranah politik tanpa melihat perbedaan identitas[30]. Pengakuan secara sosial terhadap perbedaan identitas sosial budaya merupakan cita-cita yang diidam-idamkan oleh komunitas masyarakat Mamasa. Pengakuan tersebut terpatri dalam kemampuan setiap individu yang berbeda untuk memahami perbedaan agama sehingga hal ini dapat mencegah mencuatnya sikap primordialisme atas nama suku dan agama yang selama ini kadang kala menjadi penghambat integrasi sosial dalam berdemokrasi.

Inklusifisme politik merupakan strategi yang dipraktikkan masyarakat dengan semangat mengusung kolaborasi dua agama [31]. Semangat ini dimiliki oleh seluruh warga Mamasa. Misalnya dalam pasangan calon bupati nampak pasangan calon dua keterwakilan agama, yakni Islam dan Kristen. Gejala politik ini bersumber dari semangat "saling mengerti" dan "kesadaran bersama" di mana posisi agama dijadikan sebagai sarana mencapai keberhasilan kepentingan politik dengan menegakkan dimensi positif dalam berdemokrasi.

---

[29] Piet H Khaidir, *Nalar Kemanusiaan, Nalar Perubahan Sosial* (Teraju, 2006).

[30] Imam Iqbal, "Konflik Etno-Religius' Di Indonesia Kontemporer Dalam Pandangan Orde Baru," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2017): 1–24.

[31] Pdt Retnowati, "Agama, Konflik Dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama Di Indonesia: Belajar Dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik," *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2018): 1–28.

Gambar 1 Pasangan Calon Bupati Dua Identitas Agama yang Menjadi Bupati Periode 2018-2023

Resolusi konflik dengan bentuk politik kolaborasi keterwakilan dua agama membuahkan hasil yang menggembirakan. Eskalasi konflik di Mamasa yang pada awalnya berdasarkan politik kepentingan pemekaran daerah dan berdimensi agama kemudian secara perlahan dapat dihindari. Bahkan hadirnya pasangan dua agama telah menumbuhkan prinsip egalitarian agama dalam berpolitik. Inilah yang terejawantahkan dalam resolusi konflik di Mamasa. Sikap toleran dan terbuka untuk menerima kehadiran berbagai perbedaan telah menjadi jembatan untuk memahami keanekaragaman identitas sosial dan budaya dalam masyarakat. Komitmen yang paling mendasar dari konteks ini ialah bagaimana menerapakan demokrasi dengan baik, di mana kebebasan dan kesetaraan dari warganya benar-benar diakomodir [32,33]. Para tokoh masyarakat di Mamasa senantiasa

[32] Will Kymlicka, "Kewargaan Multikultural," *Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan Oleh Edlina Hafmini Eddin*, 2002.

mengupayakan agar identitas sosial agama yang selama ini menjadi pemicu konflik, dapat dijadikan sebagai jalan resolusi dalam Pilkada, yakni bagaimana setiap individu mengakomodir setiap perbedaan demi terciptanya harmoni sosial.

Di Mamasa, setiap anggota masyarakat memberi ruang terhadap perbedaan agama untuk dipilih dalam kontestasi politik. Masyarakat selalu berusaha memperlihatkan bahwa basis kesetaraan agama dalam politik menjadi hak setiap individu dan kelompok agama [34]. Di sinilah pelembagaan politik saling mengerti mengemuka, bahwa inklusifisme keyakinan politik dan semangat partisipatif dan kerjasama serta saling mengakui dan menghargai pilihan dan pandangan politik menjadi hal lumrah pada masing-masing anggota masyarakat sekalipun berbeda agama. Prinsip saling mengerti dalam praktik politik tersebut menandaskan bahwa setiap orang mengakui dan menghargai perbedaan agama sekaligus sebagai salah satu formasi intensifikasi resolusi konflik.

Kesimpulan

Konflik etnoreligius di Mamasa merupakan imbasan dari pemekaran daerah di masa silam. Dalam kasus ini, terjadi perbedaan pandangan antara kedua belah pihak terkait pro kontra status penempatan ibu kota kabupaten. Dalam prosesnya, salah satu gejala yang mewarnai ialah konflik politik ini justru mengarah pada konflik sosial bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) terutama di wilayah (Aralle, Tabulahan, Mambi). Namun imbasannya, tidak hanya dirasakan oleh ketiga wilayah tersebut melainkan masyarakat Mamasa secara umum, bahwa ada ketegangan yang serius antara kelompok-kelompok masyarakat dari sisi etnisitas dan agama yang mengarah pada kontestasi identitas.

Untuk keluar dari kemelut konflik, politik representasi menjadi media dalam membangun rekonsiliasi sosial di Mamasa yang masyarakatnya terbagi oleh etnik dan agama. Berpegang pada kontrak sosial tidak tertulis dari tokoh-tokoh masyarakat terdahulu yang menekankan pentingnya pengembangan komunitas bersama yang lebih luas dengan mewadahi keterwakilan agama di dalam pemerintahan, masyarakat Mamasa di setiap perhelatan pilkada senantiasa memadukan dua identitas agama (Islam dan Kristen) demi menengahi fenomena benturan-benturan identitas etnoreligius

---

[33] Mahyuddin Mahyuddin, "Peran Strategis IAIN Ambon Dan IAKN Ambon Dalam Merawat Toleransi Sosial Dan Moderasi Beragama Di Ambon Maluku," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 103–24.

[34] Manase, *Mappurondo: Budaya Khas Dan Kearifan Lokal Sulawesi Barat*, 2019.

di lingkup kehidupan sosial. Strategi tersebut menjadi spirit integrasi sosial di Mamasa dan sekurang-kurangnya konflik dapat dikendalikan menjadi potensi positif dalam mengembangkan kerukunan dan keharmonian sosial.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Parepare atas bantuan penelitian Litabdimas yang diberikan kepada tim penulis. Kemudian, penulis tidak lupa menghaturkan terima kasih kepada semua pihak (pemerintah kabupaten Mamasa, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat yang telah bersedia menjadi informan dalam riset ini.

Daftar Pustaka

Abdullah, Zulkifli. "Kontestasi Elit Lokal Dalam Konflik Politik Pemekaran Daerah (Studi Kasus Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa Di Sulawesi Barat)." Universitas Indonesia, 2016. http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20433398&lokasi=lokal.

Amsler, Robert Alfred. *The Structure of The Merriam-Webster Pocket Dictionary*. Texas: The University of Texas at Austin, 1980.

Ansori, Mohammad Hasan, Rudi Sukandar, Sopar Peranto, Fathun Karib, Sofyan Cholid, and Imron Rasyid. *Segregasi, Kekerasan Dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik Di Ambon*. Jakarta: The Habibie Center, 2014.

Arraiyah, Hamdar. "Menuju Damai Dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik Di Aralle, Tabulahan Dan Mambi)." *Al-Qalam* 11, no. 2 (2018): 26–42.

Buchari, Sri Astuti. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Damsar. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Ernas, Saidin. "Policy of Social Conflict Resolution: Implementation of the Malino Agreement in Maluku." *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 2 (2012).

Hasanuddin, Andi Hasnul. "Konflik Etnisitas Dalam Pemekaran Wilayah:: Studi Tentang Konflik Etnisitas Dalam Pembentukan Kabupaten Mamasa." Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005.

Heynes, Jeff. *Demokrasi Dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga*. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.

Iqbal, Imam. "Konflik Etno-Religius' Di Indonesia Kontemporer Dalam Pandangan Orde Baru." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2017): 1–24.

Khaidir, Piet H. *Nalar Kemanusiaan, Nalar Perubahan Sosial*. Teraju, 2006.

Klicperova-Baker, Martina, and Ivo K Feierabend. "Democracy—Institutionalized Conflict Resolution: Social Psychological Explanation of Its Decline." *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology* 26, no. 2 (2020): 227.

Kymlicka, Will. "Kewargaan Multikultural." *Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan Oleh Edlina Hafmini Eddin*, 2002.

Mahyuddin. "The Crisis of Intolerance and Primordialism in the Name Of Religion in Indonesia: A Case Study Of Pilkada DKI Jakarta at 2017." *Kuriositas* 12, no. 2019 (2019): 29–30.

Mahyuddin, Mahyuddin. "Peran Strategis IAIN Ambon Dan IAKN Ambon Dalam Merawat Toleransi Sosial Dan Moderasi Beragama Di Ambon Maluku." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 103–24.

Manase, Hendry Jonathan. *Mappurondo: Budaya Khas Dan Kearifan Lokal Sulawesi Barat*. Edited by Sarman Sahuding. Mamuju: Bumi Transindo, 2019.

Mar'iyah, Chusnul. "Pemilu Dan Demokrasi: Belajar Dari Lokal." In *Seri Pemilu Dan Partai Politik Belajar Dari Politik Lokal*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2013.

Maryanah, Tabah. "Governance Dalam Manajemen Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 4, no. 1 (2013): 7–16.

Menoh, Gusti A.B. *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.

Mustafa, Muhammad Sadli. "Potret Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Mamasa." *Al Qalam* 20, no. 72 (2014): 129–38.

Nuruddin, Sabara. "Basis Paradigmatik Atas Paradoks Agama, Beragama & Keberagaman." Makassar, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 2019.

Pasaribu, Ian & Prayogi Irfan. "Bekerjanya Politisasi Identitas Pada Pilkada Sumut 2018: Menakar Pengaruh Isu Agama Terhadap Kemenangan Efy Rahmayadi Dan Musa Rajekshah." *Adhyatsa Pemilu* 4, no. No. 1 2018 (2018): Hal. 11-28.

Pruitt, Dean G. & Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Retnowati, Pdt. "Agama, Konflik Dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama Di Indonesia: Belajar Dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik." *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2018): 1–28.

Satori, Djama`an & Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Susan, Novri. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Wahid Fondation. "Survei Wahid Institute: Intoleransi-Radikalisme Cenderung Naik." Jakarta, 2020. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/284269/survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik.